

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN,
SEKTOR KESEHATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA**



Skripsi Oleh:

Larasati

01021382126156

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN,
SEKTOR KESEHATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA**

Disusun oleh:

Nama : Larasati
NIM : 01021382126156
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

Dosen Pembimbing



Tanggal : 10 Desember 2024

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP.196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, SEKTOR KESEHATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Disusun oleh:

Nama : Larasati
NIM : 01021382126156
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitis Ujian Komprehensif

Palembang, 06 Januari 2025

Ketua

Anggota



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP.196903142014092001

Feny Marissa, S.E., M.SI
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI



JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

13-1-2025
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larasati
NIM : 01021382126156
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 30 Desember 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 06 Januari 2025
Pembuat Pernyataan,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 13-1-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Larasati
NIM.01021382126156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup individu melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya dan keamanan. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara adil, komprehensif dan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2022). Konsep ini diakui secara global dan diterapkan oleh berbagai organisasi untuk UNDP mengembangkan sebuah indeks sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan manusia. Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dalam publikasi "*Human Development Report 1990*". IPM berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemajuan pembangunan di suatu negara atau wilayah. Dengan dasar tiga aspek fundamental dari jati diri manusia, IPM mampu menjelaskan perkembangan manusia secara menyeluruh dan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan seiring waktu serta antar wilayah yang berbeda (Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengeluaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan dan

kesehatan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan IPM. Tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan individu kesulitan untuk mengalokasikan dana guna memenuhi kebutuhan dasar mereka yang pada gilirannya mempengaruhi proses pembangunan manusia Senewe et al., (2021).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan signifikan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan IPM. Misalnya, penelitian oleh Novitasari & Hapitri, (2019) menekankan bahwa investasi yang kuat dalam pendidikan dan kesehatan dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan IPM. Selain itu, studi oleh Karwur et al., (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang efektif di sektor-sektor ini berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan IPM melalui berbagai program dan kebijakan yang fokus pada peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara provinsi yang lebih maju dan yang tertinggal. Oleh karena itu, analisis data IPM menjadi sangat penting untuk memahami dinamika pembangunan di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi Indonesia tahun 2021-2023 dalam satuan persen dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Provinsi (dalam persen)

No	Provinsi	IPM (%)		
		2021	2022	2023
1	Aceh	73,48	74,11	74,70
2	Sumatera Utara	73,84	74,51	75,13
3	Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64
4	Riau	73,89	74,45	74,95
5	Jambi	72,62	73,11	73,73
6	Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18
7	Bengkulu	73,16	73,68	74,30
8	Lampung	71,25	71,79	72,48
9	Kp. Bangka Belitung	72,96	73,50	74,09
10	Kepulauan Riau	77,87	78,48	79,08
11	DKI Jakarta	82,25	82,77	83,55
12	Jawa Barat	72,96	73,63	74,24
13	Jawa Tengah	72,17	72,80	73,39
14	D.I Yogyakarta	80,22	80,65	81,09
15	Jawa Timur	73,48	74,05	74,65
16	Banten	74,68	75,25	75,77
17	Bali	76,69	77,40	78,01
18	Nusa Tenggara Barat	70,86	71,65	72,37
19	Nusa Tenggara Timur	67,02	67,63	68,40
20	Kalimantan Barat	68,99	69,71	70,47
21	Kalimantan Tengah	72,81	73,17	73,73
22	Kalimantan Selatan	73,45	74,00	74,66
23	Kalimantan Timur	76,60	77,36	78,20
24	Kalimantan Utara	71,57	72,21	72,88
25	Sulawesi Utara	74,03	74,52	75,04
26	Sulawesi Tengah	70,54	71,01	71,66
27	Sulawesi Selatan	73,38	73,96	74,60
28	Sulawesi Tenggara	71,82	72,38	72,94
29	Gorontalo	69,82	70,62	71,25
30	Sulawesi Barat	68,64	69,19	69,80
31	Maluku	71,55	72,04	72,75
32	Maluku Utara	69,56	70,26	70,98
33	Papua Barat	66,11	66,72	67,47
34	Papua	61,40	62,16	63,01

Sumber: BPS Berdasarkan Provinsi Tahun 2021-2023

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di 34 provinsi Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan tiap provinsi. Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatatkan IPM tertinggi sebesar 83,55%, berkat investasi yang kuat dalam pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, Papua mencatatkan IPM terendah di angka 63,01%, meskipun mencatat ipm terendah, papua juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan akses yang lebih baik terhadap layanan publik.

Penelitian oleh Ulfatussaniah et al., (2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki investasi lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian oleh Ridwan & Nawir, (2021) menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor ini sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan IPM.

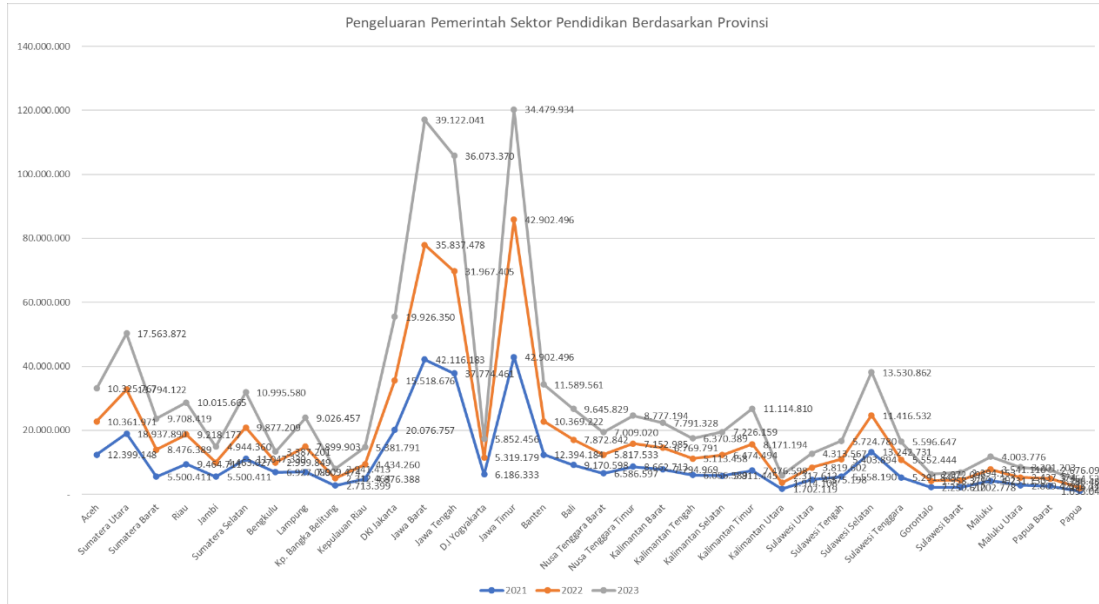
Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, beberapa provinsi mengalami stagnasi atau peningkatan yang lambat. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian oleh Sukirno, (2011) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti bencana alam, konflik sosial dan kurangnya investasi dalam pembangunan dapat menghambat kemajuan IPM. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap provinsi-provinsi yang tertinggal untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, analisis terhadap data IPM tidak hanya

memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang masih harus dihadapi.

Fenomena ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia di Indonesia, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi terutama di provinsi-provinsi yang tertinggal. Peningkatan IPM di banyak provinsi menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mulai membuahkan hasil tetapi perhatian khusus masih diperlukan untuk provinsi - provinsi yang belum merasakan manfaat dari pembangunan ini. Pemerintah juga perlu fokus pada dua sektor utama, yaitu pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah (Novitasari & Hapitri, 2019).

Pengeluaran pemerintah adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membiayai sektor publik dengan fokus utama pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Huda & Yuliati Anik, 2022). Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Maryozi et al., 2022). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponennya, terutama dalam meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah (Noviansyah et al., 2019).

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Investasi yang memadai di sektor pendidikan sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pengeluaran pemerintah yang tepat di sektor ini tidak hanya meningkatkan IPM, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan alokasi anggaran yang bijak pemerintah dapat memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua individu terlepas dari latar belakang ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2021-2023 dalam satuan rupiah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Berdasarkan Provinsi (dalam rupiah)

Sumber: DJPK Berdasarkan Provinsi Tahun 2021-2023

Gambar 1.1 menunjukkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di 34 provinsi Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 yang menunjukkan variasi signifikan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan masing-masing daerah. Pada tahun 2023, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.122.041 dan Jawa Tengah sebesar Rp36.073.370 sementara pengeluaran terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu Rp2.186.486 dan Gorontalo, yaitu Rp2.072.096. Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam prioritas dan alokasi anggaran pendidikan di setiap provinsi. Kenaikan pengeluaran di provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur yang lebih baik didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sementara itu, penurunan pengeluaran di provinsi seperti Gorontalo, Papua, dan Kalimantan Utara mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, perubahan prioritas alokasi dana atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.

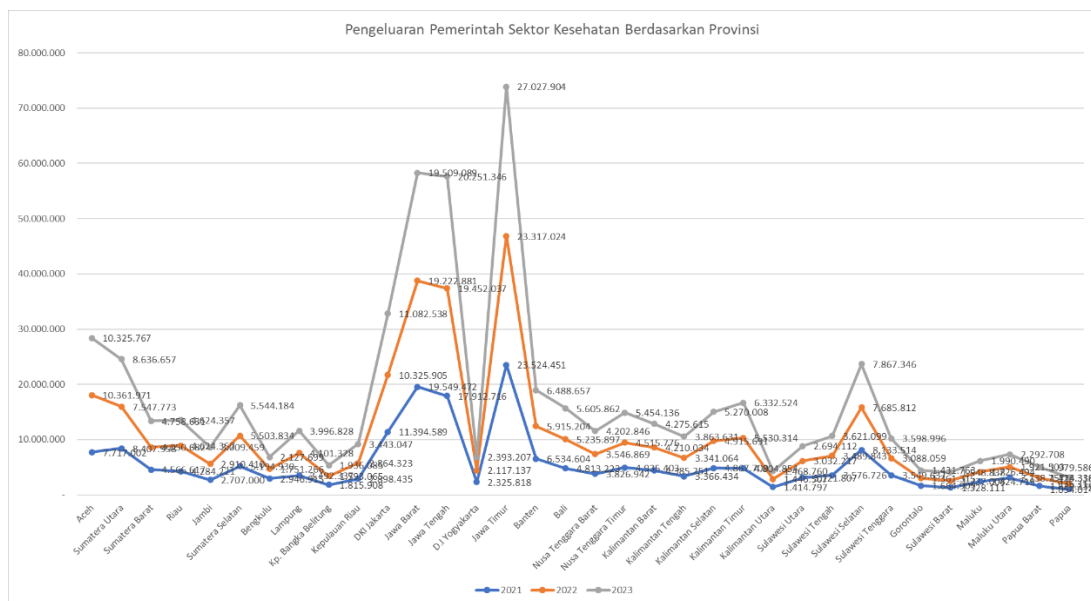
Penelitian oleh Amelia et al., (2019) menunjukkan bahwa Pengeluaran yang lebih tinggi untuk pendidikan berhubungan positif dengan peningkatan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa yang berdampak pada peningkatan IPM. Provinsi dengan pengeluaran pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik karena pendidikan berkualitas meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Namun, meski beberapa provinsi mengalami peningkatan masih ada daerah yang kesulitan mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif. Penelitian

yang dilakukan oleh Karwur et al., (2019) menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ketidakmerataan dalam pengeluaran pendidikan di Indonesia mencerminkan fenomena di mana provinsi dengan ekonomi yang lebih kuat cenderung mengalokasikan lebih banyak dana untuk Pendidikan, sementara provinsi yang lebih lemah secara ekonomi menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua provinsi terutama yang kurang beruntung mendapatkan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al., (2019) menjelaskan bahwa dengan kewajiban mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Namun, kenyataannya pencapaian pendidikan di Indonesia justru tidak sejalan dengan kewajiban alokasi dana pendidikan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan harapan hidup (Wardhana & Kharisma, 2020). Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sangat penting untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Investasi dalam layanan kesehatan meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan harapan hidup

sekaligus mengurangi kemiskinan. Dengan memastikan akses merata ke layanan kesehatan berkualitas pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2021-2023 dalam satuan rupiah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Berdasarkan Provinsi (dalam rupiah)

Sumber: *DJPK Berdasarkan Provinsi Tahun 2021-2023*

Gambar 1.2 menunjukkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di 34 provinsi dalam kurun waktu tiga tahun, dari 2021 hingga 2023, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi. Pada tahun 2023, pengeluaran tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp27.027.904, sedangkan pengeluaran terendah berada di Provinsi Papua,

yakni Rp1.114.338. Peningkatan pengeluaran di Jawa Timur kemungkinan disebabkan oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan infrastruktur medis terutama setelah dampak pandemi COVID-19 yang mendorong kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem kesehatan di provinsi tersebut.

Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami penurunan pengeluaran kesehatan yang mungkin disebabkan oleh pengurangan anggaran atau pergeseran prioritas mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran kesehatan di wilayah tersebut. Penurunan ini dapat berdampak negatif pada kualitas layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua provinsi mendapatkan alokasi anggaran yang memadai demi kesejahteraan masyarakat.

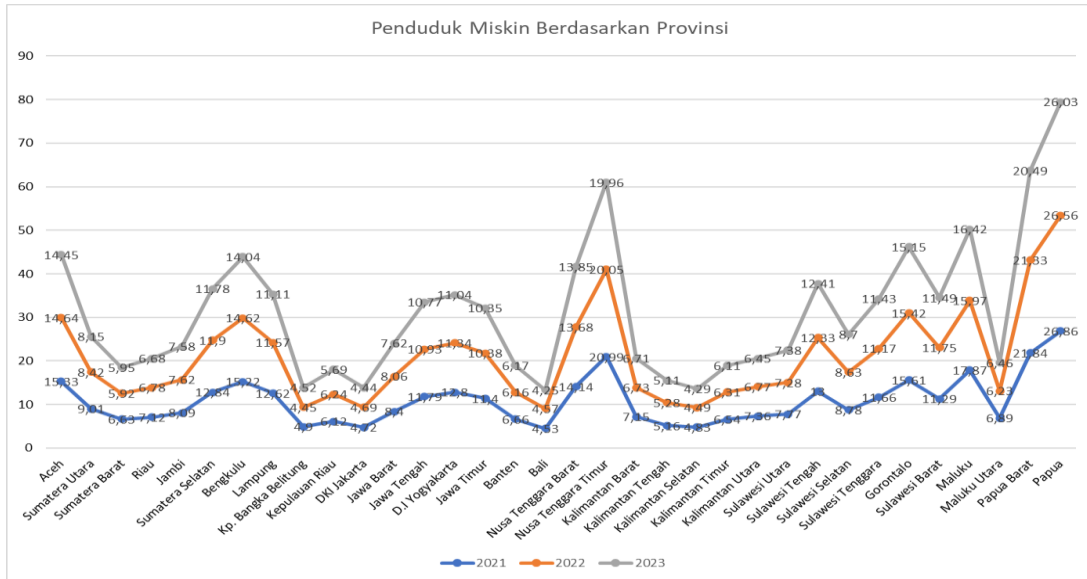
Penelitian yang dilakukan oleh Futunanembun et al., (2023) menekankan bahwa kesehatan merupakan investasi penting dalam sumber daya manusia di mana individu yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, Maryozi et al., (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang memadai di sektor kesehatan berkontribusi pada peningkatan IPM, karena kesehatan yang baik berhubungan langsung dengan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan alokasi anggaran kesehatan di Indonesia. Provinsi yang mampu meningkatkan pengeluaran kesehatan biasanya memiliki dukungan kebijakan yang kuat dan prioritas

yang jelas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sebaliknya, provinsi yang mengalami penurunan mungkin menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran atau perubahan prioritas yang mengakibatkan pengurangan dana untuk sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa semua provinsi mendapatkan alokasi yang memadai untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al., (2021) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan yang berdampak pada aspek fisik, mental, dan spiritual individu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan meningkatkan produktivitas terkait kesehatannya.

Selain Pendidikan dan kesehatan yang belum merata di setiap wilayahnya, Indikasi ketimpangan pendapatan akibat kemiskinan juga menjadi isu penting dalam pembangunan manusia. Kemiskinan dan Indeks pembangunan manusia merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan sering digunakan untuk menilai kesejahteraan manusia di suatu negara atau wilayah (Ulfatussaniah et al., 2024). Penurunan kemiskinan sangat penting untuk meningkatkan IPM, yang memerlukan fokus pada kualitas pendidikan dan kesehatan bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan meningkatkan keterampilan dan produktivitas yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor ini penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Persentase penduduk miskin di 34 provinsi Indonesia tahun 2021-2023 dalam satuan persen dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk Berdasarkan Provinsi (dalam persen)

Sumber: BPS Berdasarkan Provinsi Tahun 2021-2023

Gambar 1.3 menunjukkan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat bahwa data menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia. Pada tahun 2023, Penduduk Miskin di 34 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa Papua memiliki penduduk miskin tertinggi mencapai 26,03%, sementara Bali mencatatkan penduduk miskin terendah dengan 4,25%. Kenaikan persentase penduduk miskin di Papua dapat dijelaskan oleh berbagai faktor termasuk akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di daerah ini, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai yang mengakibatkan rendahnya keterampilan dan peluang kerja. Selain itu, kondisi

kesehatan yang buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai memperburuk situasi membuat banyak individu terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan.

Sebaliknya, Bali dengan tingkat kemiskinan terendah menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang berkembang pesat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dan akses kesehatan yang lebih baik di provinsi ini memungkinkan penduduknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan pendidikan yang baik masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk bekerja secara produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Rahimah & Chandriyanti, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina & Andriyani, (2020) menekankan bahwa akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di daerah-daerah tertentu seperti Papua berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Mereka menemukan bahwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mengakibatkan rendahnya keterampilan dan peluang kerja. Selain itu, penelitian oleh Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dapat secara signifikan mengurangi angka kemiskinan. Mereka mencatat bahwa daerah dengan

investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan menunjukkan penurunan yang lebih cepat dalam tingkat kemiskinan.

Hubungan erat antara pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM tercermin dalam fenomena ini dimana Provinsi dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik cenderung memiliki kemiskinan lebih rendah dan IPM lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang kurang perhatian pada sektor ini sering terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh provinsi terutama di daerah rentan penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta pembangunan manusia secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Senewe et al., (2021) Tingginya tingkat kemiskinan mengakibatkan individu tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka termasuk dalam konteks pembangunan manusia. Kemiskinan dapat muncul dari kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau kesulitan dalam mengakses Pendidikan.

Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang optimal. Ketidakmerataan dalam pengelolaan dan alokasi anggaran di sektor-sektor ini, serta tingginya tingkat kemiskinan berkontribusi pada rendahnya IPM di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta tingkat kemiskinan, saling berinteraksi dan

mempengaruhi IPM di 34 provinsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, peneliti melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan tingkat kemiskinan serta dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 provinsi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia, serta memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pengembangan model analisis yang lebih komprehensif terkait interaksi antara sektor pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta strategi pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan IPM.
2. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan Sebagai Pemediator Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Outcomes Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 48–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13822>
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167–1.
- Apriska, L., Irwan, M., Suprpti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Republik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2023*.
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Maneksi*, 12(3)(3).
- Dankumo, A. M., Ikwu, S. B. S., Ibrahim, J., & Auta, Y. (2024). Impact of Health and Education Expenditure on Poverty Reduction in Nigeria. *Journal of Economic and Allied*, 3(1), 45–55.
- Futunanembun, B. A., Rorong, I. P. F., & Siwu, H. F. Dj. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Huda, S., & Yuliati Anik. (2022). Analysis of the Influence of Minimum Wage and Human Development Index on Unemployment Rate In Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.271>
- Karwur, J. C., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. Ch. P. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 106–625. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32808.20.4.2019>
- Lantion, D. A. S., Musngi, G. V., & Cabauatan, R. R. (2023). Assessing the Relationship of Human Development Index (HDI) and Government Expenditure on Health and Education in Selected ASEAN Countries. *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.5555/ijosmas.v4i6.374>
- Lescano, R. M., Gallo, L. M., & Sagales, O. R. (2022). Human development and decentralization: The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 1, 1–39. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Listianingsih, R., Gunawan, A., & Arwani, A. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2016-2018). *Jurnal Sahmiya*, 1(2).
- M, C., & Ph.D, A. (2020). Impact of Health and Education Expenditure on Poverty Alleviation in Nigeria. 3(1).
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan TPAK, Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, XI(01).
- Muliza, Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1).
- Nasution, D. P., Daulay, M. T., & Handani, E. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8594>

- Nor, M., & Nasruddin. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 33–45.
- Noviansyah, H., Rosyadi, & Yacoub, Y. (2019). Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1)(1), 1–23.
- Novitasari, Y., & Hapitri, D. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, Serta Pengaruhnya Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *CAKRAWALA - Repository IMWI*, 2(1), 1–15.
- Nurkholis, A. (2016). Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/8trv7>
- Pujianti, A. D., Fatimah, S., & Sriningsih, S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.525>
- Putri, irene A., & Soesatyo Yoyok. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–7.
- Rahimah, & Chandriyanti, I. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2).
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1061. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Riana, A., & Khafid, M. (2022). Analysis of Government Spending on Education on the HDI. *JEJAK*, 15(2), 324–335. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.38263>
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Rohima, S. (2020). *Buku Ekonomi Publik*. Unsri Press.

- Rohima, S., & Budiyanto, M. N. (2024). *Fenomena Kemiskinan Perkotaan; Miskin Abu-Abu*. Unsri Press.
- Ruseva, M., Genova, D., & Jekova, V. (2015). Impact of poverty on the human development index in Bulgaria (for example of South Central region). *Trakia Journal of Science*, 13(Suppl.1), 115–120. <https://doi.org/10.15547/tjs.2015.s.01.019>
- Senewe, J., Rotinsulu, D. Ch., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *9*(3(3)), 173–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.34633>
- Setyowati, F. A., & Ediyono, S. (2021). The Influence of School Participation Rates and Poverty on the Human Development Index in Indonesia 2019.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/bkn96b53>
- Suhendi, & Astuti, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap IPM di Provinsi Papua Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(3).
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga). PT RajaGrafindo Persada.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. AMP YKPN.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Ramadani, S. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Trisno, T. U., Munajat, & Oktarina, Y. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8).
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di KabupatenKota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03).
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.

- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2020). Angka Harapan Hidup di Era Desentralisasi (Kabupaten/Kota Jawab Barat). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(5), 405–422. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i05.p02>
- Wulandari, A. I. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019.
- Yasinta, B. L., & Khusaini, M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah*, 7(1).